

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dalam penelitian ini disingkatkan menjadi UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaan usaha kecil dan menengah tersebut harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap berkembang dan hidup, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam strategi bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Peran aktif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada era pasca krisis mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat berfungsi sebagai katup pengaman permasalahan tenaga kerja. Di masa krisis, usaha kecil menengah terbukti mampu bertahan karena pelakunya berstandar pada sumber daya lokal sehingga memiliki ketahanan yang kuat.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya sering kali pengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya. Kesulitan ini menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usahanya, apalagi jika harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha. Kebanyakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya mengitung

harta yang dimiliki sebagai uang kas yang dipegang saja. Mereka tidak memahami bahwa pengertian harta lebih luas dari sekedar uang yang kas (Anak Suryono: 2006).

Sering kali dalam skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi dari pada pendapatan sebelumnya, padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau kegiatan usaha yang terjadi sehingga pengiktisaran transaksi-transaksi tersebut. Setiap usaha diharapkan memiliki laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjuk pertanggung jawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Praktek akuntansi keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahaan tersebut, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM (Wahdini dan Suhairi: 2006).

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu perusahaan adalah laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir periode sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan

suatu perusahaan (Ma'rifatul Auliyah: 2012). Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam perhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat untuk mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada laba semata. Semakin berkembangnya usaha, menurut usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan, misalkan untuk meningkatkan pendanaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan berhubungan dengan pihak bank/lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Demikian juga ketika usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengikuti lelang pengadaan barang maupun jasa yang diadakan oleh pihak rekan, pihak rekan biasanya akan meminta laporan keuangan sebagai syarat lengkap administratif. Dengan demikian dengan semakin berkembangnya usaha, menuntut usaha mikro kecil menengah (UMKM) menyediakan laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang akurat dan baku banyak membantu mereka dalam upaya pengembangan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif (I Made Narsa, dkk: 2012).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 12

Juli 2009 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2011. Dengan adanya Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya. Diterbitkan SAK ETAP bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang tidak signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (IAI: 2009).

Pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik, oleh karena itu pengguna SAK ETAP banyak terdiri dari dari entitas dengan kategori usaha kecil dan menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk dalam ETAP karena tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan tidak untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan jika, bukan entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbit efek di pasar modal atau bukan entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat (IAI: 2009).

Widyastuti Pristiana (2017) meneliti Pencatatan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Jasa” kendala yang dialami oleh pemilik usaha dalam menerapkan Pencatatan Keuangan berbasis SAK ETAP dilatarbelakangi antara lain kurangnya pengetahuan mencatat laporan keuangan secara lengkap, kurangnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan dan manfaat Pencatatan Keuangan berbasis SAK ETAP dan terbatasnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan laporan keuangan yang dibuat hanya sebagai informasi pribadi pengelola Dis-Co, Minimnya pemerintah terutama pembina UMKM untuk mensosialisasikan dan melatih para penggiat UMKM terkait hal tersebut.

Selanjutnya, Kurniawasyah Deddy (2016) meneliti “Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi” Berdasarkan kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas yaitu pengusaha UMKM merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan Pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki, kebutuhan akan penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap tidak penting dan hanya membuang waktu saja.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di kelurahan Oesapa merupakan salah satu bentuk usaha kecil-kecilan yang dibangun oleh perseorangan untuk menambah penghasilannya. Berdasarkan wawancara dan observasi UMKM memiliki permasalahan dalam hal pengelolaan keuangan dalam usahanya. maka dari itu penerapan akuntansi menjadi salah satu komponen mutlak yang harus dimiliki oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti UMKM ingin

mengembangkan usahanya. Begitu pula dengan SAK ETAP sebagai suatu standar yang mengatur pembuatan laporan keuangan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Keberadaan SAK ETAP seharusnya menjadi suatu hal yang sedikit banyak diketahui dan diterapkan dalam laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM di Kelurahan Oesapa Kota Kupang.

## **1.2.Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah penelitian adalah Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada UMKM di Kelurahan Oesapa Kota Kupang.

## **1.3.Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan penelitian adalah “Apakah Penerapan pencatatan keuangan pada UMKM Kelurahan Oesapa Kota Kupang telah sesuai dengan SAK ETAP?”

## **1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM kelurahan Oesapa Kota Kupang

## **1.4.2. Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya mengenai penerapan pencatatan SAK ETAP dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai penerapan pencatatan SAK ETAP.

### **B. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai Penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP yang ada pada UMKM Kelurahan Oesapa Kota Kupang.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Untuk membantu memberikan gambaran atau prosedur mengenai penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP.

#### **c. Bagi Universitas**

Sebagai bahan bacaan dan menambah referensi bagi pihak yang ingin meneliti lanjutan tentang “Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada UMKM kelurahan Oesapa Kota Kupang